



Etika Kristen di tengah Dinamika Politik Praktis: Merevitalisasi Nilai-Nilai Agama dalam Praktik Politik Kontemporer

DOI: <https://doi.org/10.55884/thron.v5i1.68>

Fereddy Siagian¹, Yonatan Alex Arifianto²

¹Akademi Maritim Cirebon, Jawa Barat

²Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala, Salatiga

Correspondence: fredysiangiamc@gmail.com

Abstract: The political arena allows Christians to influence the political world in ways that reflect their faith values. However, there is an imbalance between politics and religion, which often become two main components that influence each other in social life or contradict each other. Using a descriptive qualitative method, it can be concluded that revitalizing Christian values is not just a matter of applying dogmatics and religious teachings but involves a deep understanding of the current political context. The dynamics of practical politics need to be understood so Christians know the importance of understanding the nature of Christian ethics in politics. Given the challenges of applying Christian ethics and politics in the face of diverse interests and values in society, Christianity should be able to build the spirituality of politicians and revive values and morality based on the Bible. Furthermore, Christianity encourages the practical implementation of public policies that align with Christian values.

Keywords: Christian ethics; political praxis; political dynamics; religious values

Abstrak: Arena politik memungkinkan orang Kristen untuk memengaruhi dunia politik dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai iman mereka. Namun adanya ketidakseimbangan antara politik dan agama sering kali menjadi dua komponen utama yang saling memengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat ataupun saling bertolak belakang. Menggunakan metode kualitatif deskriptif maka dapat disimpulkan bahwa merevitalisasi nilai-nilai kekristenan, bukan hanya masalah penerapan dogmatika dan ajaran agama, namun melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks politik saat ini. Di mana dinamika politik praktis perlu diupayakan untuk dipahami sehingga kekristenan mengetahui pentingnya pemahaman hakikat etika Kristen dalam perpolitikan. Dan adanya tantangan dalam menerapkan etika Kristen dan politik dalam menghadapi kepentingan dan nilai-nilai yang beragam dalam masyarakat, haruslah kekristenan dapat membangun kerohanian para politikus dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan moralitas berdasarkan Alkitab. Selanjutnya kekristenan mendorong implementasi praktis dari kebijakan publik yang selaras dengan nilai-nilai agama Kristen.

Kata Kunci: dinamika politik; etika Kristen; nilai agama; politik praktis

PENDAHULUAN

Diskursus kajian yang membahas etika Kristen dan politik praktis, sesungguhnya tak terbatas hanya dalam lingkup kajian kekristenan atau rohani saja. Melainkan sampai pada pembahasan yang universal karena terkait pendidikan politik dan politik praktis dalam setiap ruang lingkup nilai agama dan bagaimana gereja dan etika Kristennya mampu merevitalisasi semua nilai demi dinamika politik kontemporer dewasa ini. Memang peran gereja dan etis teologisnya membawa suatu kepercayaan yang terkait kehidupan untuk lebih baik dan lebih menjunjung tinggi kehidupan Kristen yang terlibat dalam dinamika politik Praktis. Memang harus disadari bahwa keyakinan atau agama dalam pemilu menjadi cambuk apakah sesuatu yang

sakral dalam nilai kerohanian yang dapat membangun sumber daya manusia akan menjadi tumpul dan diperdaya dengan kepentingan politik praktis dalam politik kontemporer.

Namun, sejatinya agama dan politik sebagai dua entitas yang memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi struktur dari nilai-nilai sosial suatu negara dan masyarakatnya.¹ Politik adalah arena yang memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, dan etika Kristen menyediakan kerangka kerja dan ide serta cara yang berharga untuk membantu individu maupun kelompok untuk menjalani atau mengorganisasi kehidupan politik mereka dengan integritas dan nilai-nilai moral. Dalam era pemilu dan politik kontemporer yang penuh tantangan, penerapan etika Kristen menjadi semakin penting dan mendesak. Di mana dengan masuk dalam arena politik memungkinkan orang Kristen untuk memengaruhi dunia politik dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai iman mereka. Adanya ketidakseimbangan antara politik dan agama sering kali menjadi dua komponen utama yang saling memengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat ataupun saling bertolak belakang karena menempatkan agama diatas politik yang tidak dapat bersinggungan dengan hal-hal duniawi atau kebijakan yang memang harus dinyatakan untuk adil dan menjunjung tinggi kemanusiaan yang berbeda-beda. Tapi dewasa ini politik dan agendanya memengaruhi berbagai regulasi, kebijakan publik, dan tatanan sosial, sedangkan agama dapat terjun langsung dengan memberikan kerangka nilai moral yang membentuk norma, integritas dan dedikasi dalam berperilaku baik secara individu maupun komunal dalam masyarakat.

Sementara itu, pendeta yang dipanggil untuk melayani dan membina umat Allah, tidak bebas dari mengalami dinamika ketegangan antara taat kepada Allah dan bagaimana menjadi warga Negara yang baik.² Tentunya pendeta tidak hanya fokus untuk melayani jemaat tetapi juga perlu melakukan pelayanan di pemerintahan termasuk di bidang politik.³ Namun para pemimpin gereja untuk tidak terlibat langsung dalam politik praktis, walaupun dalam pandangannya terhadap politik diharap terus konsistensi sebagai hamba Tuhan di dunia politik ditunjukkan dengan kemampuannya untuk transparan. Sebab dapat digarisbawahi, karakter yang menopang hidupnya untuk berjuang di dunia politik dapat terlihat konsisten karena ia terbuka untuk dievaluasi, dikritisi hingga ditegur.⁴ Hal itu didasari adanya konflik tanggung jawab, konflik panggilan, dan konflik dogmatis-pragmatis, maka berdasarkan pertimbangan konflik-konflik di atas, diharapkan bahwa hamba Tuhan tetap tidak boleh untuk menjadi politikus dan terjun dalam politik praktis.⁵ Karena ketika politik bercampur aduk dengan pelayanan di dalam gereja, dalam arti yang lain gereja menjadi kendaraan bagi politik. Inilah yang dinamakan dengan kegiatan politik praktis, dimana kepentingan pribadi maupun kelompok partai politik menjadikan gereja sebagai alat untuk mencari dukungan. Hal ini membuat gereja kehilangan jati diri/identitas sebagai garam dan terang dunia.⁶ Untuk itu Sikap gereja harus terbuka terhadap politik serta melakukan terobosan yang inovatif bagi kepentingan gereja dalam membangun bangsa dan kerajaan Allah.⁷ Sepeti yang dinyatakan

¹ Osian Orjumi Moru, "Agama Dan Politik: Perbandingan Sosio-Historis Antara Konteks Indonesia Dan Kerajaan Israel Bersatu," *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 4, no. 1 (2022): 104–23.

² Markus Amid, "Urgensi Keterlibatan Pendeta Dalam Politik Praktis," *Voice of HAMI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2021): 114–30.

³ Amid.

⁴ Amid.

⁵ Gianto Gianto, "Hamba Tuhan Dan Politik Praktis: Kajian Teologis-Etis Terhadap Panggilan Hamba Tuhan Dan Keterlibatannya Dalam Politik Praktis Dalam Konteks Indonesia," *Coram Mundo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2021): 59–64.

⁶ Alfons Renaldo Tampenawas, "Pandangan Eklesiologi Calvin Mengenai Politik Praktis Dalam Pelayanan Gereja," *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2020): 115–27.

⁷ Erman S. Saragih, "Penatalayanan Gereja Dalam Politik Praktis," *Didaskein* 6, no. 2 (2016): 1–11.

oleh Saragih bahwa gereja memang harus lebih “sadar politik” apalagi dalam rangka menghadapi era reformasi yang penuh dengan gejolak politik akibat haus kekuasaan, kesenjangan sosial, krisis perekonomian dan paham radikal. Gereja perlu mengembangkan sikap politik yang mengedepankan etika Kristen.⁸

Berkaitan dengan tema besar etika Kristen berada dalam lingkaran dinamika politik praktis, sudah pernah diteliti oleh Gianto. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas yang menekankan tentang keberadaan di rakyat beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah sesuatu yang hanya mementingkan dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian rakyat yang mengeluh, karena hidup mereka belum dapat disejahterakan oleh negara. Pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk, dikarenakan pemerintah Indonesia yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan baik.⁹ Begitu juga dengan Johan Andres Serhalawan melakukan penelitian yang serupa, di mana peneliti tersebut memberikan kesimpulan bahwa Sikap etis politik gereja harus dikumandangkan kembali dalam rangka menyongsong tahun politik. Gereja harus disadarkan kembali tentang fungsi dan perannya untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang dalam bidang politik. Gereja harus berpihak kepada rakyat dan kepentingannya. Serta Melaksanakan panggilan gereja, yaitu untuk menjadi “berkat” bagi semua orang.¹⁰

Berdasarkan dengan latar belakang dinamika hubungan antara etika Kristen di tengah dinamika politik praktis, maka tulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan jawaban yang eksplisit menyangkut pertanyaan tentang “bagaimana etika Kristen di tengah dinamika politik praktis, sebagai upaya untuk Merevitalisasi nilai-nilai agama dalam pemilu dan politik kontemporer yang terjadi dewasa ini? Oleh sebab itu berdasarkan fenomena dan *research gap* maka artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan etika Kristen di tengah dinamika politik praktis, sebagai ruang publik untuk menguji apakah nilai-nilai agama dalam pemilu dan politik kontemporer mampu bertahan dan menjawab kebutuhan masyarakat modern.

METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif,¹¹ yang dilakukan melalui pendekatan kajian Studi literature. Sumber-sumber data dari penelitian terhadap topik ini diperoleh dari berbagai literatur dan tentunya sumber utama atau primer didapat dari teks alkitabiah yang menjadi pedoman untuk memberikan pemahaman mengenai etika Kristen di tengah dinamika politik praktis dan dimana peran etika kristen dapat menguji nilai-nilai agama dalam pemilu dan politik kontemporer. Oleh karena itu kekristenan atau umat Tuhan dewasa ini diharap dapat memahami dinamika Politik Praktis yang terkadang mengubah arah dengan tidak lagi mengedepankan nilai etika Kristen. Tentunya kajian teologis ini dimunculkan dari narasi teks alkitabiah sebagai data dan kajian utama untuk melawan dinamika politik praktis yang sarat dengan kepentingan pribadi atau kelompok tanpa mempertimbangkan etis teologis dan kemanusiaan. Sedangkan data sekunder dalam

⁸ Erman S. Saragih.

⁹ Gianto, “Hamba Tuhan Dan Politik Praktis: Kajian Teologis-Etis Terhadap Panggilan Hamba Tuhan Dan Keterlibatannya Dalam Politik Praktis Dalam Konteks Indonesia,” *Coram Mundo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2022): 45–50, <https://doi.org/10.55606/corammundo.v3i2.23>.

¹⁰ Johan A Serhalawan, “Sikap Etis Politis Gereja Menyongsong Tahun Politik Di Indonesia,” *Tangkoleh Putai* 15, no. 1 (2018): 75–95, <http://jurnal.iaknambon.ac.id/index.php/TP/article/view/6>.

¹¹ Umrati and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 37.

penelitian ini diperoleh dari studi perpustakaan terkait fokus penelitian seperti buku, jurnal nasional atau internasional, laporan dari portal berita nasional, dokumen dan sumber tertulis lainnya yang terkait dengan fokus penelitian.

PEMBAHASAN

Dinamika Politik Praktis

Dalam konteks etika Kristen, pemilu dan politik kontemporer sering menjadi panggung untuk menguji dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana etika Kristen terintegrasi dalam politik praktis dan menghadapi tantangan dalam era pemilu dan politik yang serba dinamis. Memang harus diakui bahwa dalam berpolitikpun adanya pernyataan iman kristiani tidak bisa dilepaskan dari kehadiran serta keikutsertaannya dalam bagian dari bernegara.¹² Politik praktis dewasa ini dapat dipahami sebagai sebuah dunia ketika segala itikad, motif, kepentingan, dan ambisi, hadir bersamaan dan saling berhimpit untuk memperebutkan kursi kedudukan untuk berkuasa. Secara kasat mata, kekuasaan yang dimaksud tidak lain adalah jabatan, kedudukan atau posisi. Namun secara implisit, yang diperebutkan sesungguhnya adalah otoritas dan wewenang untuk membuat keputusan-keputusan publik.¹³ Keputusan politik sebagai kebijakan untuk masyarakat juga tidak terlepas dari berbagai lapisan masyarakat yang mempunyai kepentingannya untuk dapat menguasai. Bila melihat fenomena perpolitikan saat ini di mana agama pun tidak terlepas dari kegiatan politik praktis yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terjun dalam dunia politik, dan dalam hal ini agama acapkali menjadi kendaraan politik untuk mencapai suatu tujuan politik kekuasaan,¹⁴ demi kepentingan personala maupun komunal. Sehingga peneliti mengungkapkan bahwa politik dan politik praktis dapat dipahami sebagai kegiatan bersama dalam sebuah negara untuk mewujudkan kebaikan bersama melalui proses-proses politik yang dibuat dalam sebuah negara, maka setiap warga Negara berhak masuk dan terlibat dalam kegiatan politik maupun dinamika politik. yang mana hal itu ditunjukkan dengan cara salah satunya mengakui pemerintahan yang legitimasi mengadakan pesta demokrasi.¹⁵ Sebab sejatinya politik adalah aktivitas yang diijinkan Tuhan.¹⁶ Namun dalam gereja ada persoalan tentang pemahaman jemaat atau orang kristen sendiri cenderung mengarah kepada hal negatif tentang politik itu sendiri, sehingga menilai pelayan atau Pendeta yang turut serta terlibat dalam kegiatan organisasi Politik mempunyai kepentingan politik di dalamnya. Bahkan lebih ekstrim lagi gereja yang kehilangan esensinya ketika aktif dalam politik praktis.¹⁷

Dari dasar pemikiran yang tidak kredibel ini kekristenan juga perlu belajar dari politik masalah bahwa sering sekali kepentingan dan agenda Kristen selalu dirugikan atau tidak menjadi prioritas maka yang perlu dilakukan pada zaman sekarang yang disebut era reformasi, orang-orang Kristen dan gereja-gereja diminta untuk mengambil sikap baru, supaya dengan demikian kepentingan Kristen lebih dapat diperjuangkan dengan hasil yang

¹² Yudhy Sanjaya, Josanti, and Aldrin Purnomo, "Teologi Politik: Politik Praktis Orang Percaya Menurut Roma 13:1-4," *Real Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan*, 2020.

¹³ Tampenawas, "Pandangan Eklesiologi Calvin Mengenai Politik Praktis Dalam Pelayanan Gereja."

¹⁴ Bayu Mitra Adhyatma Kusuma and Theresia Octastefani, "Negosiasi Dakwah Dan Politik Praktis (Membaca Orientasi Organisasi Sayap Keagamaan Islam Pada Partai Nasionalis)," *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 2, no. 1 (2017): 1–24, <https://doi.org/10.22515/balagh.v2i1.690>.

¹⁵ Sanjaya, Josanti, and Purnomo, "Teologi Politik: Politik Praktis Orang Percaya Menurut Roma 13:1-4."

¹⁶ Gianto, "Hamba Tuhan Dan Politik Praktis: Kajian Teologis-Etis Terhadap Panggilan Hamba Tuhan Dan Keterlibatannya Dalam Politik Praktis Dalam Konteks Indonesia," 2021.

¹⁷ Erman S. Saragih, "Penatalayanan Gereja Dalam Politik Praktis."

lebih baik.¹⁸ Namun ada sarat bagi kekristenan yang terlibat di dalam berpolitik harus bertumbuh secara rohani, dapat menunjukkan moralitas dan integritasnya dan memiliki intelektual hingga merepresentasikan bahwa dirinya merupakan bagian dari kehidupan konstituenya dan berpihak kepada diri mereka, terutama berjuang untuk kemaslahatan rakyat banyak.¹⁹ Serta sejatinya tidak terbawa arus dalam perputaran politik uang.²⁰ Sebab kekeristenan yang masuk kedalam politik dan terlibat secara langsung politik bukan hanya merupakan sebuah keharusan praktis (karena tidak terhindarkan), melainkan juga sebuah keharusan teologis, sebuah wujud dari ketaatan iman.²¹ Untuk membawa dampak yang besar bagi kekristenan semua mengarah nama Tuhan dumuliakan.

John Stott mencatat ada beberapa entitas dari tindakan politik yang krusial di abad ke-21 ini, yaitu: pertama, politikus harus fokus kepada struktur yang membelenggu masyarakat; kedua, mereformasi sistem kelembagaan di masyarakat agar lebih efektif; ketiga, penekanan penting kepada peran yang lebih partisipatif dari masyarakat agar dapat dibebaskan dari kemiskinan; keempat, mengubah sistem ekonomi masyarakat yang berhadapan dengan sistem pasar yang cenderung kapitalis dan hegemoni; kelima, keberpihakan kepada mereka yang terbelenggu dari kemiskinan dan penindasan melalui reformasi sistem politik.²² Ini semua adalah dinamika politik praktis yang harus diwujudkan bagi masyarakat luas. Namun perlu diakui bahwa adanya pengaruh modernitas tidak dapat dipungkiri telah menjadikan peradaban di suatu komunitas dalam segala segi juga mengalami perubahan esensial.

Hakikat Etika Kristen dalam Dinamika Politik

Dalam berteologi, persoalan dan peran politik adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Karena keberadaan orang percaya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika Kristen yang membawa pada kebaikan dalam masyarakat merupakan seperangkat prinsip dan panduan moral, serta norma dan nilai-nilai spritualitas yang mendasari keyakinan dan praktik orang-orang Kristen. Prinsip-prinsip dari etika Kristen berasal dari ajaran alkitabiah sebagai dasar dan landasan dalam mengaktualisasikan nilai dan prinsip tersebut yang memang berisi petunjuk moral dalam bermsayarakat sampai membangun bangsa dalam kaitannya terhadap politik. Dimana dengan adanya etika Kristen ini, orang Kristen diharapkan untuk sangat peduli terhadap orang lain dan diharapkan dapat melayani sesama sebagai bagian membangun damai sejahtera dan membangun kebersamaan terutama mereka yang membutuhkan. Selain itu dalam menerapkan prinsip dan nilai dari etika Kristen kekristenan dituntut menjaga dan menghidupi nilai kesucian dan moralitas, sebab etika Kristen mengajarkan kesucian pribadi dan moralitas yang tinggi. Ini melibatkan menjauhi dosa dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang dijelaskan dalam Alkitab. Yang mana kaitannya dengan tulisan ini adalah menjauhkan politik praktis yang menjatuhkan nilai agama dalam kontestansi pemilu maupun politik kontemporer.

Aktivitas sosial yang dilakukan oleh pendeta, baik itu pada cakupan pendidikan, budaya, ekonomi hingga kepada politik oleh segelintir orang dimaknai sebagai upaya melayani dan sebagai bagian dari gaya hidup yang melekat dalam diri orang percaya oleh karena Kitab

¹⁸ Erman S. Saragih.

¹⁹ Amid, "Urgensi Keterlibatan Pendeta Dalam Politik Praktis."

²⁰ Y A Arifianto, "Melawan Money Politics Dalam Elektoral: Upaya Mereduksi Kejahatan Politik Masuk Gereja," *Khamisyim: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 1, no. 1 (2023): 1–14, <https://ojs.sta-batu.ac.id/index.php/khamisyim/article/view/2>.

²¹ Mian Nugroho Agung and Jeffrie A.A. Lempas, *Yesus Dan Politik* (Jakarta: Komunitas NISITA, 2004), viii.

²² John Stott, *Isu-Isu Global Penilaian Atas Masalah Sosial Dan Moral Kontemporer Menurut Perspektif Kristiani* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015), 31.

Injil Matius menyebut istilah garam dan terang dunia.²³ Sebab, sejatinya etika Kristen berbicara mengenai siapa dan harus bagaimana manusia itu berbuat berdasarkan sudut pandang iman yang iman yang tertanam dalam ajaran, yang secara sengaja dapat membawa perubahan dalam kehidupan,²⁴ baik di market place sekuler maupun dalam dunia perpolitikan. Cara pandang inilah yang menghiasi kekristenan dalam perpolitikan menjadi lebih berwarna dan tidak selalu berkaitan dengan tindakan pelanggaran hukum.

Dalam politik, kita sering melihat retorika yang ekstrem, kebohongan, dan serangan pribadi. Bagaimana seorang Kristen ataupun pemimpin Kristen dapat tetap setia pada nilai kejujuran dan tentunya beretika ditengah perpolitikan serta harus memiliki kasih di tengah atmosfer politik yang keras dan tidak mengenal kawan maupun lawan yang ada adalah kepentingan. Sebab hal itu ditemukan fakta bahwa disorientasi kalangan politikus kebanyakan telah meninggalkan asas tersebut. Lebih banyak ingin dilayani melalui berbagai pelayanan fasilitas publik ketimbang memikirkan rakyatnya yang notabene merupakan lumbung suara bagi dirinya ketika pemilihan berlangsung.²⁵ Namun tanpa disadari dalam keputusan politik, para politikus tidak dapat mengupayakan dengan etika yang selaras dan sejalan. Dan tentunya hal itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Kristen. Misalnya, dalam kasus kebijakan yang tidak tepat terkait hak-hak LGBT atau isu-isu kehidupan disabilitas yang termarginalkan, bahkan realitas yang terjadi etika Kristen para politisi Kristen ditinggalkan hanya karena adanya politikus yang sering membutuhkan lobi-lobi kompromi untuk mencapai kepentingan personal maupun komunal. Maka Tantangan menerapkan etika Kristen menemukan keseimbangan antara mempertahankan prinsip-prinsip dalam etis teologis kekristenan dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki keadaan. Bahkan, diharapkan dalam masyarakat umum politikus dapat menerapkan etika dan nilai kekristenan tanpa melanggar prinsip,²⁶ dan tanpa memaksakan keyakinan baik agama maupun ideologis pada masyarakat yang beragam. Sebab politikus wajib memahami pentingnya pemisahan antara keputusan politik suatu kekuasaan dan dalil-dalil agama suatu masyarakat, merupakan cara penempatan agama dalam porsi yang eksklusif dan sekularistik.²⁷

Agama, Pemilu, dan Politik kontemporer

Kaitan antara agama dan politik dalam konteks kontemporer adalah isu yang kompleks dan bervariasi di seluruh dunia. Di berbagai negara, agama dapat memainkan peran yang signifikan dalam politik, memengaruhi kebijakan pemerintah, pemilihan umum, dan keputusan politik. Pengaruh agama dalam Pemilihan Umum sebagai tindakan untuk berada dalam membangun politik kontemporer, sejauh ini agama masih memiliki pengaruh yang besar dalam pemilihan umum. Partai politik dan calon sering mencoba memenangkan dukungan dari pemilih berdasarkan pandangan agama dan nilai-nilai moral. Namun adanya isu-isu seperti aborsi, hak LGBT, dan etika sosial sering kali menjadi perdebatan sengit dalam pemilihan umum di manca negara. Maka politik kontemporer yang digambarkan sebagai keadaan politik era ini, dengan berbagai macam persoalan, termasuk demokrasi, hak asasi manusia, keamanan, ekonomi, bahkan sampai pada tingkat religi pribadi seseorang menjadi

²³ Amid, "Urgensi Keterlibatan Pendeta Dalam Politik Praktis."

²⁴ Alfriana, "Implementasi Penerapan Etika Kristen Dalam Pendidikan Iman Anak," *Jurnal Veritas* 1, no. 1 (2020): 1–5, <https://osf.io/preprints/ndxcv/%0Ahttps://osf.io/ndxcv/download>.

²⁵ Amid, "Urgensi Keterlibatan Pendeta Dalam Politik Praktis."

²⁶ Aji Arifianto, Yonatan Alex; Suseno, "Filsafat Politik Dan Praktisnya Dalam Persepektif Iman Kristen," *Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 6, no. 2 (2020): 2087–7927, <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/antusias>.

²⁷ Moru, "Agama Dan Politik: Perbandingan Sosio-Historis Antara Konteks Indonesia Dan Kerajaan Israel Bersatu."

bahasan faktual saat ini. Atau, dalam politik kontemporer dapat mencakup berbagai macam masalah yang dihadapi oleh bangsa saat ini, seperti masalah marginal dan kemiskinan, kesenjangan sosial, adanya lapangan kerja yang jarang dan meningkatnya pengangguran dll. Dengan latar belakang persoalan yang nampak dan belum terealisasi maka pilihan terkait politik kontemporer menjadi cara yang digaungkan oleh para calon pemimpin dan politisi untuk memengaruhi seluruh lapisan masyarakat dan mencapai tujuan politik mereka demi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ada juga para politikus mengangkat isu agama sebagai politisasi untuk mencapai tujuan agenda politiknya. Dengan berbagai isu central dan keyakinan yang dihubungkan dengan historis maupun kajian kitab suci, namun politik ini biasanya menjadi bumerang sebab pro dan kontra pasti terjadi. Apalagi terkait agama dan kebijakan sosial yang tidak pro kepada ajaran atau dogma agama, maka politik kontemporer ini akan diserang sebab berlawanan dengan dogma agama. Dengan mengkaitkan *Aborsi, LGBT, eutanasia*, bahkan pengesahan perkawinan homoseksual akan menjadi bumerang. Politik kontemporer saat ini juga masuk melalui perlawanan terhadap kebebasan beragama. Agama menjadi bahan orasi dan tujuan politik kontemporer untuk di hargai namun disisi lain dasar agama menjadi pemicu radikalisme terhadap kerukunan dan kebebasan beragama itu sendiri. dan tentunya agama juga akhirnya menjadi salah satu promosi dari lobi dan diplomasi atau sebagai alat kebijakan untuk diterapkan ketika ia terpilih nantinya. Maka menjadi penting dan untuk digarisbawahi bahwa hubungan antara agama dan politik sangat bervariasi dan sarat dengan kepentingan calon-calon pemimpin.

Menguatnya identitas etnis, agama dan kelompok ditengah masyarakat multikultural menyebabkan terjadinya konflik-konflik horizontal ditengah kehidupan lapisan masyarakat dan dapat mengancam persatuan dan kerukunan bangsa ini. Hal ini juga di pengaruhi dengan menguatnya politik identitas ditengah masyarakat yang erat kaitannya dengan persoalan relasi kekuasaan demi masa depan pribadi ataupun kelompok yang mengatasnamakan agama. Hal ini membuat konstruksi sosial mengenai agama memiliki signifikansi untuk memobilisasi tujuan-tujuan politik.²⁸ Maka peran penting keyakinan beragama dengan segala nilai-nilai agama dalam pemilihan umum dan politik kontemporer adalah proses yang dapat memberikan wawasan dan paradigma baru yang mendalam tentang hubungan antara keyakinan dan politik, serta dampaknya dalam lapisan masyarakat. Sebab pentingnya nilai-nilai Agama dalam perpolitikan. Seperti nilai-nilai agama yang memiliki makna keadilan, kasih sayang, etika, dan moralitas dan menjunjung kemanusiaan dapat membentuk arah kebijakan dan orientasi para pemimpin politik yang menguasai kursi jabatannya. Maka para politikus diharuskan dapat memahami peran nilai-nilai dan moralitas yang dinyatakan oleh agama dalam politik dapat membantu menggali lebih dalam dinamika politik suatu daerah terlebih suatu negara. Memang pada realitanya politik sering kali menjadi tempat di mana nilai-nilai agama dan para penganutnya bersaing atau bertentangan. Saling mengklaim kebenaran dan merasa paling benar sehingga dinamika politik konteporer.

Kontroversi sering muncul ketika nilai-nilai agama satu kelompok tidak sejalan dengan kelompok lain. Ini memunculkan pertanyaannya tentang bagaimana menyeimbangkan kebebasan beragama dengan tuntutan-tuntutan politik yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai agama tertentu. Sebab gereja memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan

²⁸ Maimun Rahmat, Gloria Miagina Palako Djurubassa, and Frets A. Goraph, "Agama Dan Politik Sebagai Konstruksi Sosial Di Kabupaten Halmahera Utara," *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional* 8, no. 2 (2023): 32–51, <https://doi.org/10.52447/polinter.v8i2.6741>.

politik para politikus dan keputusan pemilih yang terlibat dalam pesta demokrasi. Agama diharapkan menjadi penengah antara nilai-nilai agama dan kebijakan publik.

Tentunya politik yang menguji nilai-nilai agama juga menyoroti isu-isu masa kini dengan menghormati hak setiap individu untuk tidak memisahkan politik dan agama, namun menjadikan agama menjadi alat untuk menanamkan nilai-nilai dan moralitas kekristenan selaras dengan kehidupan yang menjadi terang dan berkat. Karena diharapkan nilai-nilai agama dapat memengaruhi perilaku dan kebijakan pemimpin politik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sehingga masyarakat yang beragam agama, suku dan golongan politik harus belajar berkomunikasi dan mencari titik kesepakatan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas politik. Sebab mengaktualisasikan peran nilai-nilai agama dalam kancah politik dapat membantu masyarakat secara luas, mengatasi perbedaan, namun tentunya menekankan dan mempromosikan toleransi, serta menciptakan kebijakan yang lebih adil, penuh kasih dan sejalan dengan aspirasi masyarakat yang beragam demi negara dan bangsa yang maju.

KESIMPULAN

Menyoroti kompleksitas hubungan antara agama dan politik, artikel ini menekankan perlunya mengimbangi prinsip-prinsip moral dan etika yang terkadang diabaikan dalam dinamika politik kontemporer saat ini. Di mana etika Kristen di tengah dinamika politik praktis terkait menguji nilai-nilai agama dalam pemilu dan politik kontemporer merupakan bagian dari keberadaan masyarakat masa kini dan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin pluralistik. Merevitalisasi nilai-nilai kekristenan, menurut penulis, bukan hanya masalah penerapan dogmatika dan ajaran agama yang secara kaku, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks politik saat ini. Di mana dinamika politik Praktis perlu diupayakan untuk dipahami sehingga kekristenan mengetahui pentingnya pemahaman hakikat etika Kristen dalam perpolitikan. Penulis juga menyoroti tantangan dalam menerapkan etika Kristen dan politik dalam menghadapi kepentingan dan nilai-nilai yang beragam dalam masyarakat, sambil mengidentifikasi peluang untuk membangun kerohanian para politikus dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan moralitas berdasarkan Alkitab dalam kehidupan spiritualitas politikus. Sehingga mendorong implementasi praktis dari kebijakan publik dan implementasi dari kebijakan publik kepada lapisan masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai agama Kristen. Sehingga dapat membawa dampak positif bagi keadilan sosial, perdamaian, dan kesejahteraan bagi semua warga negara.

REFERENSI

- Agung, Mian Nugroho, and Jeffrie A.A. Lempas. *Yesus Dan Politik*. Jakarta: Komunitas NISITA, 2004.
- Alfiana. "Implementasi Penerapan Etika Kristen Dalam Pendidikan Iman Anak." *Jurnal Veritas* 1, no. 1 (2020): 1–5.
<https://osf.io/preprints/ndxcv/%0Ahttps://osf.io/ndxcv/download>.
- Amid, Markus. "Urgensi Keterlibatan Pendeta Dalam Politik Praktis." *Voice of HAMI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2021): 114–30.
- Arifianto, Yonatan Alex; Suseno, Aji. "Filsafat Politik Dan Praktisnya Dalam Persepektif Iman Kristen." *Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 6, no. 2 (2020): 2087–7927.
<https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/antusias>.
- Arifianto, Y A. "Melawan Money Politics Dalam Elektoral: Upaya Mereduksi Kejahatan Politik Masuk Gereja." *Khamisyim: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 1, no. 1 (2023): 1–14. <https://ojs.sta-batu.ac.id/index.php/khamisyim/article/view/2>.
- Erman S. Saragih. "Penatalayanan Gereja Dalam Politik Praktis." *Didaskein* 6, no. 2 (2016): 1–

11.

- Gianto. "Hamba Tuhan Dan Politik Praktis: Kajian Teologis-Etis Terhadap Panggilan Hamba Tuhan Dan Keterlibatannya Dalam Politik Praktis Dalam Konteks Indonesia." *Coram Mundo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2022): 45–50. <https://doi.org/10.55606/coramundo.v3i2.23>.
- Gianto, Gianto. "Hamba Tuhan Dan Politik Praktis: Kajian Teologis-Etis Terhadap Panggilan Hamba Tuhan Dan Keterlibatannya Dalam Politik Praktis Dalam Konteks Indonesia." *Coram Mundo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2021): 59–64.
- Kusuma, Bayu Mitra Adhyatma, and Theresia Octastefani. "Negosiasi Dakwah Dan Politik Praktis (Membaca Orientasi Organisasi Sayap Keagamaan Islam Pada Partai Nasionalis)." *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 2, no. 1 (2017): 1–24. <https://doi.org/10.22515/balagh.v2i1.690>.
- Moru, Osian Orjumi. "Agama Dan Politik: Perbandingan Sosio-Historis Antara Konteks Indonesia Dan Kerajaan Israel Bersatu." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 4, no. 1 (2022): 104–23.
- Rahmat, Maimun, Gloria Miagina Palako Djurubassa, and Frets A. Goraph. "Agama Dan Politik Sebagai Konstruksi Sosial Di Kabupaten Halmahera Utara." *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional* 8, no. 2 (2023): 32–51. <https://doi.org/10.52447/polinter.v8i2.6741>.
- Sanjaya, Yudhy, Josanti, and Aldrin Purnomo. "Teologi Politik: Politik Praktis Orang Percaya Menurut Roma 13:1-4." *Real Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan*, 2020.
- Serhalawan, Johan A. "Sikap Etis Politis Gereja Menyongsong Tahun Politik Di Indonesia." *Tangkoleh Putai* 15, no. 1 (2018): 75–95. <http://jurnal.iaknambon.ac.id/index.php/TP/article/view/6>.
- Stott, John. *Isu-Isu Global Penilaian Atas Masalah Sosial Dan Moral Kontemporer Menurut Perspektif Kristiani*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015.
- Tampenawas, Alfons Renaldo. "Pandangan Eklesiologi Calvin Mengenai Politik Praktis Dalam Pelayanan Gereja." *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2020): 115–27.
- Umrati, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.